

AKUNTABILITAS DANA DESA DAN TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

Umi Nurhanipah¹, Ruly Priantilianingtiasari²
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2}
uminurhanifah10@gmail.com¹, rulypriantilia@uinsatu.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa (Studi Di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung). Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memperoleh data primer melalui formulir kuesioner. Populasi dari penelitian ini yaitu aparatur desa dan masyarakat setempat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Pada penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 98 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian data pada penelitian ini menggunakan alat SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan, variabel akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap variabel pembangunan infrastruktur desa. Adapun secara simultan, akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pembangunan Infrastruktur, Tingkat Partisipasi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of village fund accountability and the level of community participation on village infrastructure development (Study in Bangoan Village, Kedungwaru District, Tulungagung District). The method used in this study uses a quantitative method by obtaining primary data through a questionnaire form. The population of this research is the village apparatus and the local community in Bangoan Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. In this study using a sample of 98 respondents. Data analysis used multiple linear regression with data testing in this study using SPSS version 26. The results showed that village fund accountability variables and community participation levels partially affected village infrastructure development variables. Simultaneously, the accountability of village funds and the level of community participation influence village infrastructure development.

Keywords: *Accountability, Infrastructure Development, Participation Level*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional agar proses pembangunan daerah dan laju pembangunan desa maupun kota semakin konsisten dan seimbang. Namun, pelaksanaan pembangunan nasional masih menghadapi berbagai permasalahan pembangunan seperti pembangunan

yang tidak merata antara desa maupun kota di Indonesia. Ketimpangan pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga pembangunan di Indonesia tidak terdistribusi dengan baik sehingga menyebabkan kemiskinan di Indonesia semakin meningkat. Menanggapi masalah tersebut, kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan mewujudkan pembangunan nasional yang berfokus pada pembangunan perdesaan dengan menggunakan dana desa. (Putra et al., 2018).

Dana desa merupakan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari berbagai pajak daerah dan perimbangan dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterima dari daerah. Penjelasan ini didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007, tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 18, yang menjelaskan bahwa dana desa berasal dari pemerintah atau APBD kabupaten maupun kota dengan minimal 10% (Dewi et al., 2019). Dalam mewujudkan kemandirian yang diberikan kepada desa dengan pengoperasian desa perlu adanya pembiayaan-pembiayaan yang ada ikatannya dengan dana desa, yang kemudian disalurkan oleh pemda daerah kepada seluruh desa. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sistem pendukung masyarakat. Jumlah yang dibagikan ke setiap desa akan berbeda-beda, tergantung letak geografis desa, jumlah penduduk dan jumlah kematian. Distribusi pendapatan daerah semakin nyata dengan keterlibatan pemerintah pusat dalam proses pembangunan desa (Dewi et al., 2019).

Pengelolaan dana desa dikatakan akuntabel jika pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan kegiatan, dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama reformasi sektor publik adalah akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas dapat diartikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan di masa lalu yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Pada saat ini, pembangunan infrastruktur harus lebih ditingkatkan karena pembangunan infrastruktur yang dibangun di desa masih banyak kekurangan sehingga masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian disisi lain pembangunan infrastruktur perlu adanya pendampingan seperti partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sebagai pengguna fasilitas secara langsung maupun tidak

langsung. Partisipasi masyarakat merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh masyarakat karena pembangunan memerlukan kontribusi yang baik bagi masyarakat dari berbagai pihak untuk merencanakan program, agar mereka yang mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan sangat penting bagi pembangunan (Sukarman & Rohim, 2022).

Agar terwujudnya akuntabilitas yang efektif maka perlu adanya penyampaian informasi yang dapat difahami. Akuntabilitas dimaksud untuk memastikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa serata menjembatani kesenjangan antara masyarakat dengan pemerintah (Aucoin & Heitman, 2000). Selain itu akuntabilitas juga dimanfaatkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pejabat publik yang dijabarkan melalui tindakan yang sesuai dengan perilaku etis. Akuntabilitas tidak hanya sebagai pertanggungjawaban keuangan serta formal suatu organisasi tetapi merupakan pertanggungjawaban yang meliputi kepatuhan pada peraturan, lingkungan organisasi, masyarakat, pemerintah (Mahayani, 2017).

Pembangunan desa harus diarahkan agar terwujudnya desa yang mandiri, yaitu desa yang masyarakatnya memiliki semangat pembangunan yang besar, yang memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah desanya. Menyusun rencana untuk memecahkan suatu permasalahan secara efektif dan efisien mungkin, dengan terlebih dahulu mengandalkan sumber daya dan dana dari masyarakat, serta dapat melanjutkan proses pembangunan (Dewi, 2017).

Tabel 1.
Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Kecamatan Di Kabupaten Tulungagung 2021

Kecamatan	Banyaknya Alokasi (Rp)		Rincian Dana Desa Per Bidang (Rp)			Jumlah
	Alokasi Dana Desa (ADD)	Dana Desa (DD)	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pen. Bencana, Kegiatan Darurat & Mendesak	
Kedungwaru	8.411.184.000	16.623.534.000	4.794.748.355	11.544.875.039	8.199.060.550	24.538.683.944
Boyolangu	7.838.178.000	14.514.008.000	7.903.758.044	905.147.475	5.802.236.481	14.611.142.000
Sumbergempol	8.357.179.000	14.080.586.000	12.455.499.826	1.956.755.030	5.789.278.950	20.201.533.806
Ngunut	7.271.653.080	15.205.291.999	7.799.052.874	7.376.039.325	6.712.492.775	21.887.584.974
Rejotangan	7.347.863.000	14.483.389.000	6.347.488.950	781.390.400	7.351.512.150	14.480.391.500

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung 2021

Pada tabel di atas menunjukkan alokasi dana desa yang telah diterima di setiap Kecamatan di Kabupaten Tulungagung sejak tahun 2021. Besaran dana desa yang diterima setiap Kecamatan berbeda-beda sesuai dengan banyaknya alokasi dana desa

yang dikeluarkan oleh desa. Pada penelitian ini mengkaji dana desa dan alokasi dana desa di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Permasalahan yang terjadi karena yang kurang keterbukaan pemerintah desa dengan masyarakat mengenai pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, masyarakat banyak yang tidak mengerti tentang pengelolaan dana desa tersebut. Selanjutnya, masalah program yang belum terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Kondisi ini yang menyebabkan masyarakat tidak puas dan kurang percaya dengan pelayanan yang ada di pemerintahan desa. Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang kurang difahami oleh berbagai pihak seperti masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar perencanaan dan pengelolaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jika desa menerapkan sikap yang terbuka dalam pengelolaan alokasi dana desa maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam proses pengelolaan alokasi dana desa serta program pemerintah desa perlu adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat agar terwujudnya desa yang mandiri dan sejahtera.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Prayogi (2019) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balapulung Wetan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sukarman (2022) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Hasil penelitian. Penelitian lain yang dilakukan Zulfadzal (2020) yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur Desa Lampeudeu Baroh. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dan

partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur Desa Lampeudeu Baroh.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung)” Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur, untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur desa, serta untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur desa (Studi Di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).

KAJIAN TEORI

Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam Bahasa inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban ini sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang dan kekuasaan yang sah. Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban terhadap atasan, responsivitas terhadap masyarakat serta komitmen terhadap nilai dan standar moral yang lebih tinggi (Raba, 2020). Akuntabilitas adalah sikap dan perilaku seseorang maupun organisasi yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu yang telah direncanakan atas dasar persetujuan bersama. Dalam pemerintahan desa dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan suatu pengelolaan keuangan yang meliputi yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Raba, 2020). Indikator Akuntabilitas dana desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20-38, meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan, (5) Pertanggungjawaban.

Dana Desa

Dana desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Dana desa diharapkan bisa mensejahterakan dan dapat

memeratakan pembangunan bagi masyarakat desa. Dana desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa, dapat mengurangi kemiskinan, dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Hanafie et al., 2019).

Tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui peningkatan pembangunan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa dalam pembangunan desa (Hanafie et al., 2019).

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses maupun kebebasan untuk setiap orang untuk memperoleh data mengenai kebijakan, proses pembuatan serta penerapan dan hasil-hasil yang dipakai (Ultafiah, 2018). Transparansi merupakan penyampaian informasi tentang pengelolaan maupun penyelenggaraan pemerintah desa yang dilakukan dengan jujur dan mengutamakan keterbukaan terhadap masyarakat (Yalti, 2020).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan seseorang dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat yang di di luar pekerjaannya (Putri et al., 2016). Partisipasi masyarakat juga mengandung makna keikutsertaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah, memikirkan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Idajati et al., 2016). Partisipasi masyarakat juga digunakan oleh negara maju sebagai pendekatan yang efektif pada pelaksanaan program dalam pengambilan suatu keputusan (Xie et al., 2017).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan di setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal tersebut dikarenakan keberhasilan suatu program pembangunan bukan berdasarkan kemampuan pemerintah, akan tetapi berkaitan dengan partisipasi masyarakat juga. Namun, permasalahan yang muncul di masyarakat salah satunya yaitu sering dikecewakan oleh program pembangunan yang sebelumnya belum terselesaikan dengan baik, sehingga muncul rasa curiga pada proses pembangunan selanjutnya (Nasdian, 2014).

Jadi partisipasi masyarakat adalah kesediaan orang atau beberapa orang dalam memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya secara sukarela untuk ikut aktif dan

inisiatif dalam suatu kegiatan yang ada dilingkungan masyarakat untuk mencapai kehidupan masa mendatang yang lebih baik tanpa mengorbankan kepentingan pribadi. Indikator partisipasi masyarakat menurut Marschall (2006), meliputi a) adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat; b) kemampuan masyarakat terlibat dalam suatu proses; c) adanya akses masyarakat dalam pengambilan keputusan; d) kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan perencanaan; e) keterlibatan masyarakat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil.

Pembangunan Infrastruktur

Secara umum pembangunan infrastruktur merupakan semua struktur serta fasilitas dasar, baik fisik maupun sosial misalnya bangunan, jalan, jembatan, sekolah dan masih banyak lagi. Infrastruktur merupakan suatu usaha pertumbuhan yang dilaksanakan mulai dari perencanaan untuk membangun sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan proses pembangunan. Infrastruktur adalah fasilitas fisik yang dikembangkan salah satunya penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, dan pelayanan untuk memfasilitasi tujuan dari ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur desa perlu diperhatikan antara lain: jalan, jembatan penghubung, pembuatan tampungan air, dan pembuatan sumur bor. Dengan adanya dana desa masyarakat sangat diuntungkan sehingga masyarakat lebih sejahtera (Kodatie, 2009).

Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kepentingan sehingga perlu adanya skala prioritas pembangunan. Ada yang hanya dilakukan sekali dengan perawatan yang berkelanjutan, namun juga ada yang sifatnya berkembang. Dalam kegiatan pembangunan infrastruktur tidak lepas begitu saja terhadap infrastruktur yang sudah ada sehingga perlu dibuat Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). RUTR adalah acuan yang harus dipahami dan secara konsisten harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Manfaat pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan infrastruktur dapat dilihat dari pemanfaatan dan dampak dinamika pembangunan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat (Zulfadzal, 2020). Indikator pembangunan infrastruktur menurut Zulfadzal (2020) meliputi, a) pemenuhan kebutuhan dasar; b) pembinaan dan pengelolaan bidang pendidikan; c) pembangunan

dan pemeliharaan tempat ibadah; d) pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, dan tanggul; e) pembangunan sarana olahraga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu *skala numeric* (angka). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil pengisian kuesioner. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 6.321 yang diperoleh dari data penduduk yang ada di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Sampel dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan masyarakat setempat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 98 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk *form*. Dan disebar secara online sehingga tidak memerlukan *paperless* serta dapat dijangkau responden.

Dalam penelitian ini skala penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *skala likert* dengan menggunakan 5 point skala likert untuk mengungkapkan jawaban responden dengan memilih lima alternatif jawaban yaitu sangat setuju (ST), setuju (S), cukup setuju (CS), tidak setuju (TS), dan sangat tidak setuju (STS) Instrumen penelitian sebelum disebarkan pada responden dilakukan uji validitas, uji asumsi data, dan uji hipotesis, dengan menggunakan alat ukur SPSS versi 26.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis

Uji T

Hasil uji hipotesis yaitu uji T ditunjukkan pada Tabel 7 sebagai berikut:

Tabel 7.
Hasil Uji T

Coefficient		
	Model	T
		Sig.
1	(Constant)	2.053
	Akuntabilitas Dana Desa	.043
	Tingkat Partisipasi Masyarakat	.016
		.000

a. Dependent Variable: Pembangunan Infrastruktur

Dari Tabel 7. mengenai analisis Uji T dapat diketahui sebagai berikut, a) variabel akuntabilitas dana desa mempunyai nilai t_{hitung} 2.460 dan nilai sig .016 Dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} tidak berada dalam rentang $-t_{tabel}$ sampai $+t_{tabel}$ (2.460 di luar rentang -1.98447 sampai +1.98447) dan nilai signifikansi sebesar $0.016 < 0.05$. Dengan hipotesis uji H_0 ditolak dan H_1 diterima maka, bisa disimpulkan artinya variabel akuntabilitas dana desa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa pada Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung; b) Variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat mempunyai nilai t_{hitung} 4.126 dan nilai sig .000. Dapat disimpulkan bahwa nilai t_{hitung} tidak berada dalam rentang $-t_{tabel}$ sampai $+t_{tabel}$ (4.126 di luar rentang -1.98447 sampai +1.98447) dan nilai signifikansi sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan hipotesis uji H_0 ditolak dan H_1 diterima maka, bisa disimpulkan artinya variabel Tingkat Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa pada Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Uji F

Hasil uji hipotesis yaitu uji F ditunjukkan pada Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	191.507	2	95.754	24.579	.000 ^b
	Residual	370.095	95	3.896		
	Total	561.602	97			
a. Dependent Variable: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur						
b. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas Dana Desa						

Dari data pada tabel 8. diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 24.579 dengan Sig. sebesar ,000. Sedangkan nilai F_{tabel} untuk $\alpha = 0,05$; $df_1 = 2$ dan $df_2 = 95$ sebesar 3.09. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($24.579 > 3.09$) dan $Sig. < \alpha$ ($0,000 < 0,05$). Artinya, model regresi yang terbentuk memenuhi *goodness of fit model* atau model regresi yang terbentuk layak dan dapat digunakan untuk memprediksi bahwa variabel penelitian akuntabilitas dana desa dan tingkat partisipasi masyarakat mempunyai

pengaruh secara simultan terhadap Pembangunan infrastruktur desa pada Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

Uji Koefisien Determinan (Adjusted R²)

Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada table 9 sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.584 ^a	.341	.327	1.974
a. Predictors: (Constant), Tingkat Partisipasi Masyarakat , Akuntabilitas Dana Desa				

Dari tabel 9. diperoleh angka R square sebesar .341 atau 34.1% hal ini menunjukkan persentase variabel penelitian Akuntabilitas dana desa dan Tingkat partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh terhadap pembangunan infrastruktur desa sebesar 34.1% sedangkan 65.9% dipengaruhi oleh variabel lain. Dimungkinkan variabel lain yang mempengaruhi adalah variabel transparansi, efektivitas pengelolaan dana desa, dan kepemimpinan pemerintah desa atau variabel lain yang tidak peneliti teliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa akuntabilitas dana desa menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Menurut teori Supadmi & Suputra (2018) bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk pengelolaan dana desa, yang berdasarkan pada tata cara, praktik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sukarman & Rohim (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Berdasarkan fakta lapangan akuntabilitas di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sudah berjalan dengan baik. Dari segi pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung semakin meningkat.

Proses pembangunan fisik maupun non fisik dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama. Salah satunya tersedianya pengembangan dan pengelolaan di bidang kesehatan, tersedianya pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah, tersedianya pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum yang memadai, serta tersedianya pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Menurut teori Soemanto (2005) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu dimana warga negara sebagai individu dan kelompok sosial serta organisasi berpartisipasi dan mempengaruhi proses perencanaan dan pemantauan tindakan secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Zulfadzal (2020) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Sesuai fakta dilapangan partisipasi masyarakat di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung sangat tinggi. Pemerintah desa memberikan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat saat pengambilan keputusan dan masyarakat antusias terlibat dalam proses perencanaan yang meliputi pengidentifikasian masalah dalam perencanaan dalam pembangunan. Salah satunya ikut serta dalam proses pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa.

Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa

Berdasarkan pengujian secara simultan bahwa akuntabilitas dan tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan infrastruktur desa. Hal ini di buktikan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa nilai $F_{hitung} > \text{nilai } F_{tabel}$ ($24.547 > 3.09$) serta nilai $sig < 0.05$.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung), dapat ditarik kesimpulan yaitu: Akuntabilitas Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Tingkat Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bangoan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Aucoin, P., & Heitman, R. (2000). The Dialectics of Accountability for Performance in Public Management Reform. *Internasional Review of Administrative Sciences*, 66(1), 45-55. <https://doi.org/10.1177/0020852300661005>
- Dewi, C. K., Abdullah, M. I., & Moh, F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu Kabupaten Boul. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 57-64.
- Dewi, R. (2017). Pembangunan Pedesaan dan Kemandirian Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 39-49. <https://journal.stianasional.ac.id/index.php/humanis/article/view/5>
- Hanafie, H., Nugraha, A., & Huda, M. (2019). Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 39-46. <https://governmentjournal.org/index.php/jip/article/view/94>
- Idajati, H., Pamungkas, A., & Vely, K. S. (2016). The Level of Participation in Mangrove Ecotourism Development, Wonorejo Surabaya. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 227, 515-520. 10.1016/j.sbspro.2016.06.109
- Kodatie, R. J. (2009). *Infrastruktur dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Mahayani, N. L. A. (2017). Prosocial Behavior dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(2), 129-144. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i02.p07>
- Marcshell, M. J. (2006). Parent Involvement an Education Outcomes for Latino Students. *Review of Policy Research*, 23(5), 1053-1076. <https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2006.00249.x>
- Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Akseibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pematang. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 1-6. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj/article/%20view/299>
- Putra, C. K., Pratiwi, R. N., & Suwondo. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/193>

- Putri, R. A., Astuti, W., & Rahayu, M. J. (2016). Community Capacity in Prividing Neighborhood Unit-scale Social Infastructure in Supporting Surakarta Child Friendly. *Procedia – Social and Behavioral Science*, 227, 536-544. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816307984>
- Raba, M. (2020). Akuntabilitas Konsep dan Implementasi. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Sukarman, S., & Rohim, R. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infastruktur di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. *Majalah Ilmiah “CAHAYA ILMU”*, 4(1), 27-40. <http://jurnal.stiapembangunanjember.ac.id/index.php/cahayailmu/article/viewFile/281/268>
- Supadmi, N. L., & Suputra, I. D. G. (2018). Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Keuangan pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Pariwisata*, 13(2), 132-140. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/383>
- Ultafiah, W. (2018). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governace pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah, Palembang
- Xie, L., Xia, B., Hu, Y., Shan, M., Le, Y., & Chan, A. P. C. (2017). Public Partisipation Performance in Public Construction Projects of South China: A Study of the Guangzhou. *Journal of Project Management*, 35(7), 1391-1401.
- Yalti, M. E. (2020). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabuapaten Aceh Tengah. *Skripsi*. UIN Ar-Raniry, Aceh
- Zulfadzal, Z. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Pembangunan Infastruktur Desa (Studi di Kecamatan Gampong Lampeudeu Baroh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie). *Skripsi*. UIN Ar-Raniry, Aceh